



# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA

### INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN 2019



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Pangkalpinang 33149

<http://perindag.babelprov.go.id>

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**TAHUN 2019**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PANGKALPINANG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya jualah dapat disusun sekaligus diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Laporan ini disusun mengacu pada Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan good governance.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pangkalpinang,       Maret 2020

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

**Drs. H. SUNARDI, M. AP**  
NIP 19631223 198603 1 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Visi Gubernur beserta Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah ***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropoltan dan bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.***

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang yang tersedia, maka tujuan jangka menengah pembangunan Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Perindustrian dan Perdagangan:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Industri
2. Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya Penerimaan Retribusi Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu
4. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, serta dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2019. Sasaran tersebut adalah:

1. Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah
2. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan
3. Meningkatnya Nilai ekspor
4. Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
5. Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha
6. Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
7. Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Capaian kinerja indikator lainnya akan dijelaskan secara terperinci pada BAB III.

Dalam hal akuntabilitas keuangan, tahun 2019 Anggaran Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 23.636.309.547,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 12.493.158.847,00 dan belanja langsung sebesar Rp 11.143.150.700,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2019, anggaran Perindustrian dan Perdagangan menjadi Rp 24.456.586.995,00 (mengalami kenaikan sebesar Rp 820.277.448,00 atau 3,47%) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 13.206.236.295,00 dan belanja langsung sebesar Rp 11.250.350.700,00. Total Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 21.942.884.986,82 atau 89,72% yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 12.089.520.417,00 atau 91,54% dan Belanja Langsung Rp 9.853.364.569,82 atau 87,58 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.513.702.008,18 atau 10,28%. Sedangkan dana APBN berupa dana Dekonsentrasi dengan total pagu anggaran Rp 3.277.170.000,00 dan realisasi penyerapan sebesar Rp 3.086.480.971,00 atau 94,18%.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	3
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIS</b>	
2.1 Perencanaan Kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	16
2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja .....	29
3.2 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja ....	35
3.3 Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....	44

## LAMPIRAN

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daftar Aset

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka dalam upaya mengimplementasikan pelaksanaan **Azas Akuntabilitas**, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada pimpinan dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Inpres 7/1999 disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah : 1) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 2) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 3) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen pertanggungjawaban tersebut berupa Laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah/OPD yang bersangkutan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam hubungan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu perangkat Gubernur berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dalam mengelola berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2019 yang mengacu pada program rencana pembangunan jangka menengah daerah yang didanai baik dari APBD maupun dana lainnya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar penetapan kinerja dapat dicapai serta kendala-kendala apa yang menghambat pencapaian kinerja perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun mendatang. Sebagai perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan atas dasar mandat yang telah diberikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Dinas, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2019.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

## 1.3 Gambaran Umum Organisasi

### 1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala UPTD, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian dan 14 (empat belas) orang Kepala Seksi.

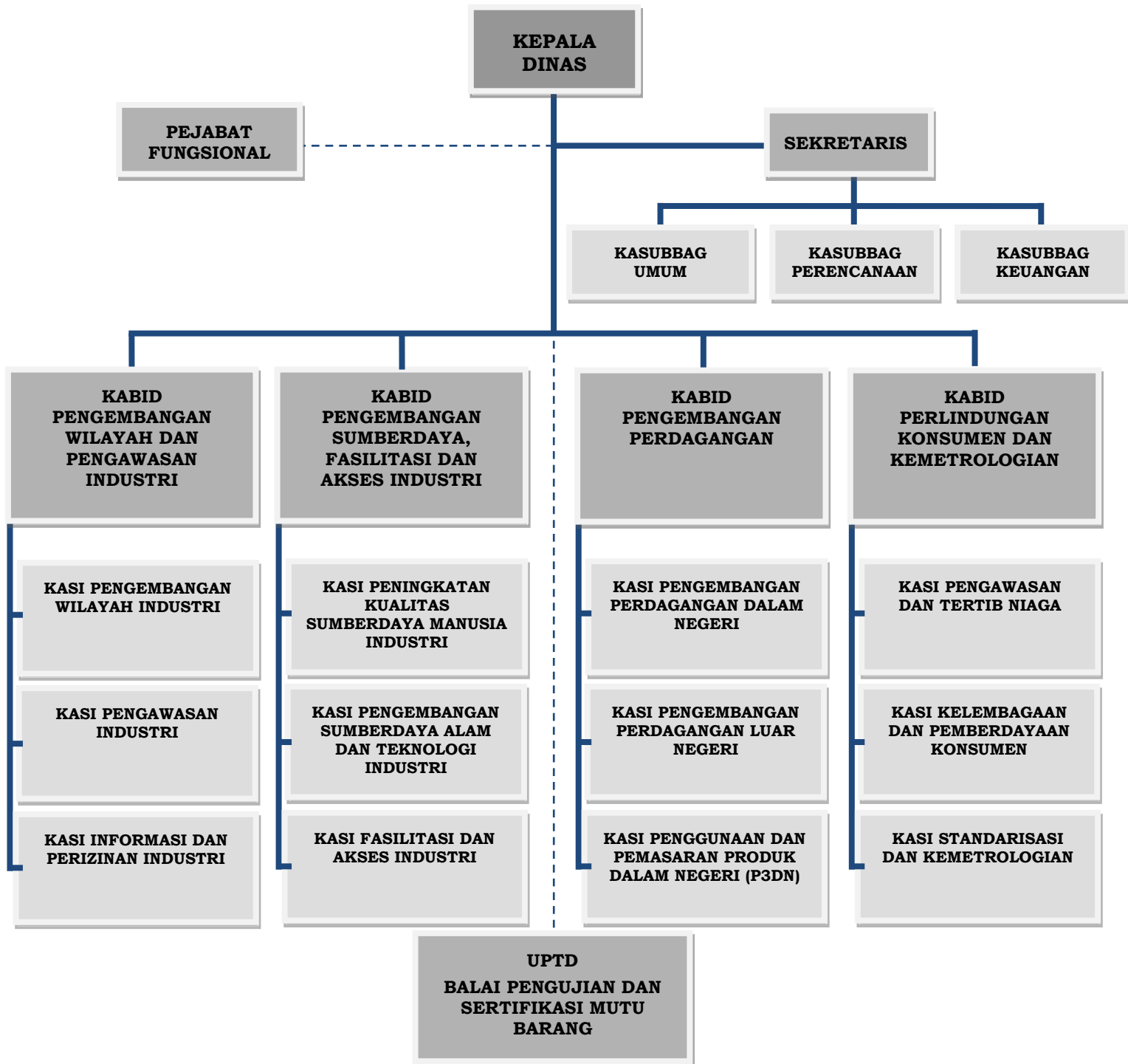
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - Sub Bagian Umum;
  - Sub bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi dan Akses Industri, membawahkan:
  - Seksi Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Industri;

- Seksi Pengembangan Sumber daya Alam dan Teknologi Industri;
  - Seksi Fasilitasi dan Akses Industri.
- d. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri, membawahkan:
- Seksi Pengembangan Wilayah Industri;
  - Seksi Informasi dan Perizinan Industri;
  - Seksi Pengawasan Industri.
- e. Bidang Pengembangan Perdagangan membawahkan:
- Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
  - Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, membawahkan:
- Seksi Pengawasan dan Tertib Niaga;
  - Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
  - Seksi Standarisasi dan Kemetrolgian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), membawahkan:
- Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi;
  - Seksi Pengendalian Mutu.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD
- Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
  - Penguji Mutu Barang

Terlampir bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



### 1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

#### 1.3.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 berdasarkan pendistribusian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Distribusi PNS dan CPNS  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah Cpns	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	9		9
		Gol. III	66		66
		Gol. II	17		17
		Gol. I	-	-	-
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-
		S2	14		14
		S1	47		47
		D. IV	-	-	-
		D. III	18		18
		D. I	-	-	-
		SMA/ sederajat	13		13
		SMP/ sederajat	-	-	-
		SD/ sederajat	-	-	-
III.	Berdasarkan Jabatan	<b>Struktural:</b>			
		Eselon II	1	-	1
		Eselon III	6	-	6
		Eselon IV	16	-	16
		<b>Fungsional:</b>			
		Tertentu	20	-	20
		Umum	49	-	49
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>92</b>	<b>-</b>	<b>92</b>

### **1.3.2.2 Asset SKPD**

Asset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran Tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlampir bagan tabel Rekap Inventaris Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

##### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **IV. PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN: 1. Indikator Kinerja Utama  
2. Perjanjian Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. PERENCANAAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Perencanaan Kinerja dimulai dari agenda penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen penganggaran atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

#### RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus tujuan bagi seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat serta dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah **“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”**.

Sehubungan dengan penetapan Visi tersebut, telah ditetapkan rumusan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka Pencapaian Visi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai berikut :

#### 1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Pembangunan ekonomi** adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor.

b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

**2. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;**

Pernyataan misi ini mengandung makna:

a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

b. **Konektifitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

**3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

**4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

a. **Kesehatan Masyarakat** adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup

**5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;**

Pernyataan misi ini mengandung makna :

a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

## 6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan dan mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, maka Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya harus mendukung keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 - 2022, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Misi ke-1 (satu) yaitu : **Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah**; pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah, peningkatan investasi, serta peningkatan ekspor. pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan , serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah, Misi ke-5 (lima) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**; tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis, dapat dilihat pada tabel II.1 dan tabel II.2

Tabel II.1  
Tujuan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	5	5	5	5
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	idealnya stabilitas harga kebutuhan barang pokok 2-3 % (tingkat kenaikan harga)	< 3	< 2.5	< 2.5	< 2.5	< 2.5
3.	Mengembangkan Kinerja Ekspor	Nilai Ekspor Bersih (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan Kasus Pengaduan (%)	25	25	50	50	50
5.	Peningkatan PAD	Peningkatan nilai retribusi (%)	80	15	50	50	50
6.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	100	100	100

**Tabel II.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Industri Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertanian (%)	10	10	10	10	10
	Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan	Persentase pertumbuhan industri sektor Kelautan dan Perikanan (%)	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan industri sektor Pariwisata (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan	Persentase pertumbuhan industri sektor Pertambangan (%)	0	0	5	0	5
	Meningkatnya tenaga Kerja Industri	Persentase pertumbuhan tenaga kerja industri (%)	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri	Persentase pertumbuhan kawasan industri (%)	0	20	20	20	40
		persentase pertumbuhan industri kawasan Lepar Pongok (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Selat Nasik (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Tanjung Ular (%)					
		persentase pertumbuhan industri kawasan Sadai (%)					
persentase pertumbuhan industri kawasan teluk klabat belinyu (%)							
Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri	Persentase jumlah industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri.	15	15	15	15	15	

2.	Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok	Ketersediaan barang kebutuhan pokok (persen;komoditi)	100;11	100;11	100;11	100;11	100;11
	Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	<11	<11	<11	<11
	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun (sarana dan prasarana)	87	92	94	96	98
3.	Meningkatnya produk ekspor, eksportir dan terpantaunya produk impor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.162,94	1.186,19	1.203,99	1.222,05	1.240,38
4.	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase penurunan jumlah pengaduan (%)	5	5	5	5	5
5.	Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian	Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertanian (%)	80	10	5	5	5
		Peningkatan nilai retribusi Sektor Pertambangan (%)	0	5	45	45	45
6.	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan	100	100	100	100	100

## Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dapat dilihat pada tabel II.3

Tabel II.3  
Strategi dan Arah Kebijakan

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah		
No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menumbuhkembangkan Industri berbasis potensi sumber daya daerah	Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis pertanian dan daya saing industri melalui pemanfaatan Teknologi
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis kelautan dan perikanan
		Mendorong Tumbuhnya industri kreatif, kerajinan dan industri pendukung sektor pariwisata
		Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis mineral hasil tambang
		Mendorong penumbuhan, pengembangan dan daya saing industri melalui pendampingan, pelatihan kewirausahaan, pelatihan teknis, manajerial, promosi industri dan memberikan fasilitasi dan akses terhadap industri
2.	Penguatan Struktur Industri Berbasis kawasan strategis, wilayah dan sumber daya lokal yang berkelanjutan	Mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang memberi nilai tambah komoditi utama potensi daerah melalui pendekatan kewilayahan
3.	Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional	Meningkatkan koordinasi kebijakan antara sektor-sektor pembangunan lainnya dalam pembangunan industri daerah dan nasional
4.	Pemetaan Wilayah dan Penetapan Potensi komoditi Unggulan daerah dan penetapan/pembangunan kawasan strategis industri (KI/KPI/SIKIM)	Road map/ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
5.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
6.	Kelancaran Distribusi Barang Pokok dan Barang Strategis	Memperkuat rantai suplay dan pasokan barang terutama bagi bahan kebutuhan pokok dan barang strategis
7.	Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru	Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah

8.	Meningkatkan pembangunan pasar tradisional dan pasar modern menjadi pasar rakyat	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar dalam negeri
9.	Mempertahankan pasar ekspor yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berdaya saing serta upaya mengendalikan impor	Mendorong upaya-upaya perluasan jenis komoditi dan tujuan pasar ekspor yang berkelanjutan ditunjang dengan pemantauan dan pengawasan atas impor daerah
10.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta Tertib Niaga	Peningkatan kesesuaian barang beredar dan Jasa terhadap ketentuan yang berlaku serta pelaku usaha yang memiliki Legalitas
11.	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar (barang ilegal–bahan berbahaya–standar–dumping, dll	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik kepada pelaku usaha
12.	Menjamin mutu pelayanan tera dan tera ulang, kalibrasi alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	mewujudkan lembaga kemetrolgian yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memperoleh pengakuan formal (akreditasi) secara nasional maupun internasional
13.	Menambah ruang lingkup pelayanan jasa teknis dan pembinaan standarisasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun Badan Akreditasi Internasional	Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
14.	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui pelayanan sertifikasi dan pengendalian mutu	Meningkatkan kapasitas dan kemampuan laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor
15.	Membina dan melaksanakan koordinasi dengan PPMB, BSN, PUSTAND dan instansi terkait dalam kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu	Menjaga kualitas produk ekspor unggulan Bangka Belitung melalui standarisasi dan manajemen mutu barang ekspor pada perusahaan pelaku ekspor
16.	Mendorong berkembangnya industri pangan yang sehat dan sesuai standarisasi olahan pangan	Memberikan kemudahan fasilitasi dan akses industri dalam mendapatkan informasi nutrisi olahan pangan
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi		
17.	Meningkatkan pelayanan terhadap aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintah</li> <li>2. Meningkatkan kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya aparatur</li> <li>4. Meningkatkan kesadaran kedisiplinan aparatur</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kesesuaian terhadap dokumen perencanaan daerah.</li> </ol>

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2017-2022 yang mendasarkan pada program pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPJMD 2017-2022. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam mendukung pencapaian visi misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan program-program selama kurun waktu 2017-2022. Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi indikator pada RPJMD. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel II.4

Tabel II.4

### Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kawasan Industri Dan Sikim	0	20	20	20	20	20	5 Kawasan SIKIM
2	Persentase pertumbuhan pelaku usaha baru dan berdaya saing dibidang industri	2376	20	20	20	20	20	4752 Pelaku Usaha Baru
3	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Yang Tersedia Setiap Waktu	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100	11 : 100
4	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana	87	2,30	1,15	1,15	1,15	1,15	93 UNIT

	Perdagangan Yang Dibangun							
5	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor	831.825 TON	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	865.000 TON
6	Persentase Jumlah Barang Beredar Dan Jasa Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan	112 Barang	9	12,5	16,1	24	28	100 Barang yang diawasi sesuai ketentuan
7	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	140 Pelaku Usaha	7	11	14,3	15,7	17,85	92 Pelaku Usaha Yang Taat
8	Indeks Keberdayaan Konsumen	N/A	20	22	25	27	29	29 = Paham
9	Persentase Jumlah Standarisasi Lab Kemetrolgian Yang Memenuhi Standar	0	14,3	14,3	28,6	28,6	14,3	7 Standarisasi Lab Kemetrolgian
10	Nilai Restribusi	117.965.000	275.000.000	300.000.000	325.000.000	350.000.000	375.000.000	375.000.000
11	Persentase Komoditi Unggulan Daerah Yang Diuji	2 Komoditi	0	50	0	0	50	4 Komoditi
12	Persentase Besaran Yang Di Kalibrasi	0	0	100	100	100	100	4 BESARAN
13	Persentase Industri Baru Yang Tumbuh Dan Berkembang	N/A	2	2	2	2	2	
14	Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu (Koevisien Variasi)	<11	<11	<11	<11	<11	<11	<11
15	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Legalitas	140 Pelaku Usaha	10	15	20	25	30	140 Pelaku Usaha
16	Persentase Peningkatan Penerimaan Restribusi Dari LAB BSPM	114.815.000	139,52	161,29	183,06	204,84	226,61	114.815.000
17	Jumlah Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Dibangun	87	89	90	91	92	93	87
18	Nilai Ekspor	1.624.971.663,03 USD	24.374.574,95	27.624.518,27	30.874.461,60	32.499.433,26	34.124.404,92	1.624.971.663,03 USD
19	Penurunan Nilai	69.389.481,40						69.389.481,40 USD

	Impor	USD	693.894,81	1.387.789,63	2.081.684,44	2.775.579,26	3.469.474,07	
20	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	2	3	3	5	5	5	5
21	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	80	100	100	100	100	100	100

Dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat 8 (delapan) indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama. Ke-delapan indikator kinerja utama tersebut adalah sebagaimana tersaji pada Tabel II.5. berikut ini:

**Tabel II.5.**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri	(Rp)	9.157.209.890	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	114.060.000,-
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	2.551.438.300,-
		Persentase Tenaga Kerja Industri	%	0,82	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri	256.760.000,-
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	%	1,15	Program Pengembangan Perdagangan	522.280.000,-
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor	(Juta US\$)	1.668.488.999,16	Program Pengembangan Perdagangan	53.050.000,-
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	%	<11	Program Pengembangan Perdagangan	458.332.000,-
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	%	35	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	71.360.000,-
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai	2	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	163.795.000,-

7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	%	146	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1.687.769.000,-
8.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Pelayanan	Nilai	3	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.371.506.400,-

### 2.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

#### Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

#### Nilai Investasi Industri

Capaian kinerja dari Nilai Investasi Industri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 2.665.498.300,- dan realisasi sebesar Rp 2.397.772.661,- atau 89,96 % yang terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Wilayah dan Pegawai Industri dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.095.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.710.000,- atau 98,33%.
- b. Kegiatan Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv), kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 7.850.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 350.000,- atau 4,46%.

- c. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri), kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.570.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 20.346.000,- atau 71,21%.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri), kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.830.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.529.000,- atau 93,77%.
- e. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.715.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 31.962.500,- atau 74,83%.
- f. Kegiatan Pendataan Perizinan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.900.000,- atau 98,57%.

dan Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

- g. Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 523.199.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 487.478.200,- atau 93,17%.
- h. Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 786.115.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 740.612.291,- atau 94,21%.
- i. Kegiatan Rumah Pengembangan Produk, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 315.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 226.195.620,- atau 71,75%.
- j. Kegiatan Lomba Industri Kreatif, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 59.995.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 49.350.300,- atau 82,26%.

- k. Kegiatan Promosi/Gelar Produk Industri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 719.913.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 668.657.550,- atau 92,88%.
- l. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan OVOP, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 61.575.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 53.754.400,- atau 87,30%.
- m. Kegiatan Fasilitasi Uji Nutrisi, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 85.389.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 84.926.800,- atau 99,46%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Nilai Investasi Industri adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 2.665.498.300,- / 9.157.209.890,-) \times 49.608.063,-) - \text{Rp } 2.397.772.661,-$$

$$= \text{Rp } -2.383.332.650,-$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Nilai Investasi Industri dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp -2.383.332.650,- atau dengan Persentase -89,41%. Adanya inefisiensi penggunaan sumber daya tersebut dikarenakan tidak ada penambahan dan perluasan industry tahun 2019 agar hasil capaian Nilai Investasi Industri dapat ditingkatkan perlu pengembangan Kawasan industry lebih lanjut.

### **Persentase Tenaga Kerja Industri**

Capaian kinerja dari Persentase Tenaga Kerja Industri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 5.371.506.400,- dan realisasi sebesar Rp 5.146.505.485,65 atau 95,81% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 256.760.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 234.154.200,- atau 91,20%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Tenaga Kerja Industri adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran} \\ E/I &= ((\text{Rp } 256.760.000,- / 80\%) \times 80\%) - \text{Rp } 234.154.200,- \\ &= \text{Rp } 22.605.800,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Tenaga Kerja Industri dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 22.605.800,- atau dengan Persentase 8,80%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Tenaga Kerja Industri dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

### **Persentase Sarana Perdagangan**

Capaian kinerja dari Persentase Sarana Perdagangan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 522.280.000,- dan realisasi sebesar Rp 339.921.866,- atau 65,08% yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 310.826.866,- atau 77,71%.
- b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.280.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 29.095.000,- atau 23,79%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Tenaga Kerja Industri adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran} \\ E/I &= ((\text{Rp } 522.280.000,- / 1,15\%) \times 0\%) - \text{Rp } 339.921.866,- \\ &= \text{Rp } -339.921.866,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Sarana Perdagangan dapat dikatakan terjadi inefisiensi sebesar Rp -339.921.866,- atau dengan Persentase -65,08%. Adanya inefisiensi penggunaan

sumber daya tersebut dikarenakan tidak ada kegiatan yang menambah sarana perdagangan, agar hasil capaian Persentase Sarana Perdagangan dapat ditingkatkan perlu penambahan fisik sarana dan prasarana perdagangan.

### **Nilai Ekspor**

Capaian kinerja dari Nilai Ekspor di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 53.050.000,- dan realisasi sebesar Rp 36.195.500,- atau 68,23% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.280.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 11.795.050,- atau 96,05%.
- b. Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 33.570.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 19.545.000,- atau 58,22%.
- c. Kegiatan Partisipasi Papper Day, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.200.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.855.450,- atau 67,44%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Nilai Ekspor adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 53.050.000,- / 1.668.488.999,16) \times 1.393.000.000,30) - \text{Rp } 36.195.500,-$$

$$= \text{Rp } 8.095.263,-$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Nilai Ekspor dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 8.095.263,- atau dengan Persentase 15,26%.

### **Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)**

Capaian kinerja dari Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019

didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 458.332.000,- dan realisasi sebesar Rp 383.149.631,- atau 83,60% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pelaksanaan pasar Murah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 222.865.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 181.285.000,- atau 81,34%.
- b. Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 202.802.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 176.744.631,- atau 87,15%.
- c. Kegiatan Informasi Perdagangan Dalam Negeri, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.665.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 25.120.000,- atau 76,90%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) adalah sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

$$E/I = ((\text{Rp } 458.332.000,- / 100\%) \times 100\%) - \text{Rp } 383.149.631,-$$

$$= \text{Rp } 75.182.369,-$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 75.182.369,- atau dengan Persentase 16,40%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) dapat lebih ditingkatkan dengan menambah volume pelaksanaan.

### **Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas**

Capaian kinerja dari Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 71.360.000,- dan realisasi sebesar Rp 36.522.000,- atau 51,18% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 28.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.899.000,- atau 79,79%.

- b. Kegiatan Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.960.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.625.000,- atau 14,94%.
- c. Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.700.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 8.998.000,- atau 76,91%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E/I &= ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran} \\
 E/I &= ((\text{Rp } 71.360.000,- / 35) \times 35) - \text{Rp } 36.522.000,- \\
 &= \text{Rp } 34.838.000,-
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 34.838.000,- atau dengan Persentase 48,82%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

### **Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen**

Capaian kinerja dari Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 163.795.000,- dan realisasi sebesar Rp 156.018.400,- atau 95,25% yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 74.590.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 69.496.800,- atau 93,17%.
- b. Kegiatan Pos Layanan Pengaduan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 42.180.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 41.579.400,- atau 98,58%.

- c. Kegiatan Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 47.025.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 44.942.200,- atau 95,57%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 163.795.000,- / 2) \times 2) - \text{Rp } 156.018.400,- \\ &= \text{Rp } 7.776.600,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 7.776.600,- atau dengan Persentase 4,75%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen dapat lebih ditingkatkan.

### **Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

Capaian kinerja dari Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 1.687.769.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.123.124.826,17,- atau 66,54% yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.344.569.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 854.642.776,17 atau 63,56%.
- b. Kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 16.726.400,- atau 52,19%.
- c. Kegiatan Monitoring Mutu Pengujian, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 89.350.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 73.623.150,- atau 82,40%.

- d. Kegiatan Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 32.000.000,- 28.400.000,- atau 88,75%.
- e. Kegiatan Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 189.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 149.732.500,- atau 78,89%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang adalah sebagai berikut:

$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp } 1.687.769.000,- / 146) \times 133,56) - \text{Rp } 1.123.124.826,17,- \\ &= \text{Rp } 420.837.007,- \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 420.837.007,- atau dengan Persentase 24,93%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dapat lebih dikembangkan ruang lingkup pengujian.

### **Persentase Tingkat Pelayanan**

Capaian kinerja dari Persentase Tingkat Pelayanan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp 5.371.506.400,- dan realisasi sebesar Rp 5.146.505.485,65 atau 95,81% yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 759.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 682.654.755,65 atau 89,85%.
- b. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 4.543.626.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 4.421.649.930,- atau 97,32%.

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 14.300.000,- atau 69,42%.
- d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.230.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 22.250.900,- atau 63,16%.
- e. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan, kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.250.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 5.649.900,- atau 46,12%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase Tingkat Pelayanan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E/I &= ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran} \\
 E/I &= ((\text{Rp } 5.371.506.400,- / 100\%) \times 100\%) - \text{Rp } 5.146.505.485,65 \\
 &= \text{Rp } 225.000.914,35
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase Tingkat Pelayanan dapat dikatakan terjadi efisiensinya sebesar Rp 225.000.914,35 atau dengan Persentase 4,19%. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Tingkat Pelayanan dapat lebih ditingkatkan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. CAPAIAN KINERJA**

Capaian Kinerja Organisasi dapat dilihat dengan melihat hasil dari Pengukuran dan Penilaian Kinerja. Kerangka Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa : indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Evaluasi kinerja tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disusun berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2018. Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kesesuaian antara Rencana Kerja Tahunan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diukur tingkat capaian kinerja berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil) dari kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Hingga akhir tahun 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dapat dilihat, sebagai berikut:

#### **1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI**

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2019 (eselon II) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2019 (eselon II)

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0.82
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1.15
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.668.488.999,16
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	35%
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	146

- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890	49.608.063	0,54
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0.82	5,58	680,49
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1.15	0	0
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.668.488.999,16	1.393,30	83,52
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	8,23	100

5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	35%	35%	100
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2	2	100
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	146	133,56	91,48
<b>Total Rata-rata capaian sasaran</b>					

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2019	+/- (%)
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	-	0,54	0,54
		Persentase Tenaga Kerja Industri	-	680,49	680,49
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	2,3	0	-2,3
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	152,26	83,52	-68,74
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	100	100	0
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	143	100	-43
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	100	100	0
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-	91,48	91,48

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra 2017-2022

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Rentra 2019	Realisasi (%) 2019
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890	49.608.063
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0.82	5,58
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1.15	0
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.668.488.999,16	1.393,30
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalinya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	8,23
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	35%	35%
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2	2
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	146	133,56

### Sasaran 1 : Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah

Indikator Kinerja : Nilai Investasi Industri dan Persentase Tenaga Kerja Industri

Target Kinerja Tahun 2019 : Nilai Investasi Industri Rp 9.157.209.890 dan Persentase Tenaga Kerja Industri 0.82%

Realisasi Perolehan Nilai Investasi Industri Tahun 2019 sebesar Rp 49.608.063,- sangat jauh dibawah target Rp 9.157.209.890,- atau hanya mencapai sebesar 0,54%, hal ini dikarenakan tidak ada penambahan dan perluasan industry tahun 2019. Sedangkan Persentase Tenaga Kerja Industri tumbuh sebesar 5,58% melebihi yang di targetkan 0,82% atau memperoleh capaian 680.49%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menumbuh kembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri	(Rp)	9.157.209.890	49.608.063	0,54
	Persentase Tenaga Kerja Industri	%	0.82	5,58	680,49

### Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan

Indikator Kinerja : Persentase Sarana Perdagangan

Target Kinerja Tahun 2019 : Persentase Sarana Perdagangan 1,15%

Realisasi Perolehan Persentase Sarana Perdagangan Tahun 2019 sebesar 0% tidak sesuai target 1,15%, hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan yang menambah sarana perdagangan.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	%	1,15	0	0

### Sasaran 3 : Meningkatnya Nilai ekspor

Indikator Kinerja : Nilai Ekspor

Target Kinerja Tahun 2019 : Nilai Ekspor (Juta US\$) 1.668.488.999,16

Realisasi Perolehan Nilai Ekspor Tahun 2019 sebesar 1.393,30 Juta US\$ sedikit dibawah target 1.668.488.999,16 US\$ atau hanya mencapai sebesar 83,52%, hal ini dikarenakan perolehan Nilai Ekspor sangat didominasi oleh Ekspor Timah, sehingga bila komoditi ini mengalami penurunan maka sangat berpengaruh pada perolehan Nilai Ekspor.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor	(Juta US\$)	1.668.488.999,16	1.393,30	83,52

### Sasaran 4 : Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat

Indikator Kinerja : Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)

Target Kinerja Tahun 2019 : Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi) <11%

Realisasi Perolehan koefisien variasi Tahun 2019 sebesar 8,23% sesuai target yang harus dicapai dibawah atau <11% jadi untuk capaian target koefisien variasi mencapai 100%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	%	<11	8,23	100

### Sasaran 5 : Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha

Indikator Kinerja : Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas

Target Kinerja Tahun 2019 : Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas 35%

Realisasi Perolehan koefisien variasi Tahun 2019 sebesar 35% sesuai target yang harus dicapai 35% jadi untuk capaian indicator ini mencapai 100%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	%	35	35	100

**Sasaran 6** : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Indikator Kinerja : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Target Kinerja Tahun 2019 : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen 2

Realisasi Perolehan Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2019 peningkatan indeks 2 sesuai target yang harus dicapai 2 jadi untuk capaian indicator ini mencapai 100%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Nilai	2	2	100

**Sasaran 7** : Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Target Kinerja Tahun 2019 : Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 146%

Realisasi Perolehan Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Tahun 2019 sebesar 133,56% sedikit dibawah target 146% atau hanya mencapai sebesar 91,48%, hal ini dikarenakan untuk Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diperlukan penambahan ruang lingkup pengujian, sehingga bila ada penambahan ruang lingkup pengujian maka ragam sampel yang bias di uji dan disertifikasi bisa bertambah.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	%	146	133,56	91,48

**Sasaran 8** : Meningkatnya Pelayanan Pemerintah

Indikator Kinerja : Persentase Tingkat Pelayanan

Target Kinerja Tahun 2019 : Persentase Tingkat Pelayanan nilai 3

Realisasi Perolehan koefisien variasi Tahun 2019 nilai 2 sesuai target yang harus dicapai 2 jadi untuk capaian indicator ini mencapai 100%.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Pelayanan	Nilai	3	3	100

### 3.2. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

#### a. Target dan capaian program

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian	Ket
1.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	100	100%	
		Predikat (NILAI) Sakip Perangkat Daerah	3	3	100%	
2.	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	Jumlah Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Kawasan Sentra	1	1	100%	
		Persentase Industri yang memenuhi standar	15	15	100%	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitasi dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total Tenaga Kerja	5,17 %;	5,17 %;	100%	
		Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	0,7 %;	0,7 %;	100%	
		Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Pariwisata	0,319 %;	0,319 %;	100%	
		Persentase Industri yang memiliki Informasi Kandungan Nutrisi Olahan Pangan	4,68 %;	4,68 %;	100%	
		Pertumbuhan industri pada Sektor Pertanian	1.499 unit;	1.499 unit;	100%	
		Persentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,28%	10,28%	100%	
		Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4 unit;	4 unit;	100%	
		Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Bidang Industri Turunan Pertambangan	1,035%	1,035%	100%	
4.	Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Volume Ekspor (TON)	862.000 Ton	619.141,19 Ton	71,83%	
		Persentase Rumah Tangga Miskin Yang bekerja disektor Perdagangan	10%	0	0	Tidak ada kegiatan di tahun 2019 yang support dengan indikator Persentase Rumah Tangga Miskin Yang bekerja disektor

					Perdagangan	
		Persentase Pemantauan dan Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (18 bahan kebutuhan Pokok)	83%	83%	100%	
		Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun	63%	0	0	kegiatan tidak fokus pada Pembangunan sarana dan prasarana tetapi lebih pada pengelolannya untuk indikator Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun
		Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan	20%	20%	100%	
		Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui pasar lelang	1	0	0	Tidak ada kegiatan di tahun 2019 yang support dengan indikator Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui pasar lelang
		Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam negeri	10	10	100%	
5.	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	Persentase Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14%	14%	100%	
		Indeks Keberdayaan Konsumen (Ket : Sadar =0 - 20 ,Paham =21-40 , Mampu = 41-60, Kritis = 61-80, Berdaya = 81-100)	22	43,34	100%	
		Persentase Pengembangan Standarisasi dan Lab Kemetrolgian	20%	0	0%	
6.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran)	18%	18%	100%	

## b. Target dan capaian kinerja kegiatan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian	Ket
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang)	132	132	100	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	132	132	100	
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur perangkat Daerah yang meningkatkan kapasitasnya (orang)	10	10	100	
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)	2	2	100	
5.	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% (Jenis Dokumen )	5	5	100	
6.	Pelaksanaan pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	30	41	136,67%	
7.	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku usaha)	45	37	82,22%	dari 32 eksportir timah yang terdaftar hanya 4 perusahaan yang melakukan ekspor balok timah.
8.	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah Gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola	1	1	100%	
9.	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku usaha)	40	40	100%	
10.	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah keikutsertaan (kali)	3	3	100%	
11.	informasi Perdagangan Dalam Negeri	tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya (komoditi)	20	20	100%	
12.	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	jumlah orang (orang)	10	10	100%	
13.	Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya Kegiatan partisipasi (org)	11	17	154,55%	
14.	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen yang tersusun (dokumen)	1	1	100%	

15.	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi (unit)	1	9	900%	
16.	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra industri	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan sentra industri (lokasi)	2	2	100%	
17.	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	50	50	100%	
18.	Peningkatan Pemahaman Standar Produk industri	jumlah peserta yang memahami standar produk idustri (peserta)	60	60	100%	
19.	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang disusun (buku)	1	1	100%	
20.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih (Pelaku Industri/Masyarakat)	80	80	100,00%	
21.	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	700	700	100,00%	
22.	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat (Pelaku Industri/Masyarakat)	500	500	100,00%	
23.	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi (Pelaku industri)	400	400	100,00%	
24.	Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif (Produk)	30	30	100,00%	
25.	Promosi/Gelar Produk Industri	Jumlah Event (Event)	9	15	166,67%	
26.	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP (OVOP)	9	9	100,00%	
27.	Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah Produk Yang Memiliki Informasi Nutrisi (Produk)	120	120	100,00%	
28.	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa (Barang dan Jasa)	10	10	100,00%	
29.	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta (Orang)	100	100	100,00%	
30.	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen (Pengaduan)	36	36	100,00%	

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Belanja	APBD	APBD-P	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	12.493.158.847,00	13.206.236.295,00	12.089.520.417,00	91,54
Belanja Langsung	11.143.150.700,00	11.250.350.700,00	9.853.364.569,82	87,58
Total Belanja	23.636.309.547,00	24.456.586.995,00	21.942.884.986,82	89,72

Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan APBD Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Kode	Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI s.d. Desember 2018	
				Keuangan	%
	<b>01.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>5.371.506.400,00</b>	<b>5.146.505.485,65</b>	<b>95,81</b>
1	01.01.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.800.000,00	682.654.755,65	89,85
2	01.01.02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.543.626.400,00	4.421.649.930,00	97,32
3	01.01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.600.000,00	14.300.000,00	69,42
4	01.01.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	35.230.000,00	22.250.900,00	63,16
5	01.01.05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	12.250.000,00	5.649.900,00	46,12
	<b>02.</b>	<b>Program Pengembangan Perdagangan</b>	<b>1.033.662.000,00</b>	<b>759.266.997,00</b>	<b>73,45</b>
6	01.02.01	Pelaksanaan pasar Murah	222.865.000,00	181.285.000,00	81,34
7	01.02.03	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	12.280.000,00	1.795.050,00	96,05
8	01.02.05	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	400.000.000,00	310.826.866,00	77,71
9	01.02.06	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	33.570.000,00	9.545.000,00	58,22

10	01.02.07	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	202.802.000,00	176.744.631,00	87,15
11	01.02.09	informasi Perdagangan Dalam Negeri	32.665.000,00	25.120.000,00	76,90
12	01.02.38	Pengadaan Gerobak	-	-	-
13	01.02.39	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	122.280.000,00	29.095.000,00	23,79
14	01.02.40	Partisipasi Papper Day	7.200.000,00	4.855.450,00	67,44
	<b>03.</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah dan Pegawai Industri</b>	<b>114.060.000,00</b>	<b>86.797.500,00</b>	<b>76,10</b>
15	01.03.01	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	23.095.000,00	22.710.000,00	98,33
16	01.03.04	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	7.850.000,00	350.000,00	4,46
17	01.03.05	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	28.570.000,00	20.346.000,00	71,21
18	01.03.06	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	4.830.000,00	4.529.000,00	93,77
19	01.03.07	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	42.715.000,00	31.962.500,00	74,83
20	01.03.08	Pendataan Perizinan	7.000.000,00	6.900.000,00	98,57
	<b>04.</b>	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Fasilitas dan Akses Industri</b>	<b>2.808.198.300,00</b>	<b>2.545.129.361,00</b>	<b>90,63</b>
21	01.04.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan	256.760.000,00	234.154.200,00	91,20
22	01.04.02	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	523.199.900,00	487.478.200,00	93,17
23	01.04.03	Inkubator Wirausaha Baru	-	-	-
24	01.04.04	Pemberdayaan Dekranasda	786.115.000,00	740.612.291,00	94,21
25	01.04.05	Rumah Pengembangan Produk	315.250.000,00	226.195.620,00	71,75
26	01.04.08	Lomba Industri Kreatif	59.995.000,00	49.350.300,00	82,26
27	01.04.09	Promosi/Gelar Produk Industri	719.913.500,00	668.657.550,00	92,88
28	01.04.10	Pembinaan dan	61.575.000,00	53.754.400,00	87,30

		Pengembangan OVOP			
29	01.04.11	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	-
30	01.04.12	Fasilitasi Uji Nutrisi	85.389.900,00	84.926.800,00	99,46
	<b>05.</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian</b>	<b>235.155.000,00</b>	<b>192.540.400,00</b>	<b>81,88</b>
31	01.05.01	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	28.700.000,00	22.899.000,00	79,79
32	01.05.03	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	74.590.000,00	69.496.800,00	93,17
33	01.05.04	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	42.180.000,00	41.579.400,00	98,58
34	01.05.08	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	47.025.000,00	44.942.200,00	95,57
35	01.05.11	Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan massa Berlaku Standar Ukur	-	-	-
36	01.05.14	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	30.960.000,00	4.625.000,00	14,94
37	01.05.15	Pengawasan Tertib Niaga	11.700.000,00	8.998.000,00	76,91
	<b>06.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk</b>	<b>1.687.769.000,00</b>	<b>1.123.124.826,17</b>	<b>66,54</b>
38	01.06.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	1.344.569.000,00	854.642.776,17	63,56
39	01.06.02	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	32.050.000,00	16.726.400,00	52,19
40	01.06.03	Monitoring Mutu Pengujian	89.350.000,00	73.623.150,00	82,40
41	01.06.04	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	32.000.000,00	28.400.000,00	88,75
42	01.06.06	Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	189.800.000,00	149.732.500,00	78,89

	<b>Total Nilai Belanja Langsung</b>	11.250.350.700,00	9.853.364.569,82	11.250.350.700,00
	<b>Total Nilai Belanja Tidak Langsung</b>	13.206.236.295,00	12.089.520.417,00	13.206.236.295,00
	<b>Total Nilai Belanja SKPD</b>	24.456.586.995,00	21.942.884.986,82	24.456.586.995,00

Didukung Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Dekonsentrasi Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

No.	Kementerian	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian RI	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.564.900.000	1.520.188.356	97,14
2.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.179.661.000	1.080.539.290	91,60
3.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	532.609.000	485.753.325	91,20
<b>Total</b>			<b>3.277.170.000</b>	<b>3.086.480.971</b>	<b>94,18</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Gambaran tentang Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Tahun 2018 ini adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2019 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2019. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2019 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun.

Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi RPJMD dan Renstra 2017 - 2022 dapat dicapai pada akhir masa jabatannya.

Selama tahun 2019 ini ditemui adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi sasaran program tidak tercapai seratus persen, antara lain :

1. Masih Rendahnya pencapaian nilai investasi industry yang hanya mencapai sebesar 0,54%, akibat tidak ada penambahan dan perluasan industry tahun 2019;
2. Tidak terjadinya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dikarenakan kegiatan tidak fokus pada Pembangunan sarana dan prasarana tetapi lebih pada pengelolaannya untuk indikator Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun;
3. Menurunnya pencapaian Nilai Ekspor hanya mencapai sebesar 83,52%, dikarenakan perolehan Nilai Ekspor sangat didominasi oleh Ekspor Timah, sehingga bila komoditi ini mengalami penurunan maka sangat berpengaruh pada perolehan Nilai Ekspor.
4. Masih kurang pencapaian target pada Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Tahun 2019 sebesar 133,56% sedikit dibawah target 146% atau hanya mencapai sebesar 91,48%, dikarenakan untuk Persentase Peningkatan Contoh

Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diperlukan penambahan ruang lingkup pengujian, sehingga bila ada penambahan ruang lingkup pengujian maka ragam sampel yang bisa di uji dan disertifikasi bisa bertambah.

#### **4.2. Strategi Peningkatan Kinerja**

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
2. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real;
3. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja SKPD;
4. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.
5. Melakukan evaluasi terhadap capaian dan target pada Renstra dan RPJMD 2017 – 2022.

## **LAMPIRAN**

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daftar Aset

## Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% Efisiensi
	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	5.371.506.400	5.146.505.485,65	225.000.914,35	4,19%
					Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.800.000	682.654.755,65	225.000.914	4,19%
					Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.543.626.400	4.421.649.930	77.145.244	10,15%
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.600.000	14.300.000	121.976.470	2,68%
					Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	35.230.000	22.250.900	6.300.000	30,58%
					Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	12.250.000	5.649.900	12.979.100	36,84%
	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890	49.608.063		2.665.498.300	2.397.772.661	(2.383.332.650)	-89,41%
					Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	114.060.000	86.797.500		
					Kegiatan Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	23.095.000	22.710.000	385.000	1,67%
					Kegiatan Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	7.850.000	350.000	70.300.000	895,54%
					Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra industri	28.570.000	20.346.000	8.224.000	28,79%
					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	4.830.000	4.529.000	301.000	6,23%
					Kegiatan Peningkatan Pemahaman Standar Produk industri	42.715.000	31.962.500	10.752.500	25,17%
					Kegiatan Pendataan Perizinan Industri	7.000.000	6.900.000	100.000	1,43%
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas dan Akses Industri	2.551.438.300	2.310.975.161		
					Kegiatan Fasilitas Uji Nutrisi	85.389.900	84.926.800	463.100	0,54%
					Kegiatan Rumah Pengembangan Produk	315.250.000	226.195.620	89.054.380	28,25%

					Lomba Industri Kreatif	59.995.000	49.350.300	10.644.700	17,74%
					Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produk OVOP	61.575.000	53.754.400	7.820.600	12,70%
					Kegiatan Promosi/Gelar Produk Industri	719.913.500	668.657.550	531.198.283	73,79%
					Kegiatan Pemberdayaan Dekranasda	786.115.000	740.612.291	45.502.709	5,79%
					Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Industri	523.199.900	487.478.200	35.721.700	6,83%
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0,82	5,58	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	256.760.000	234.154.200	22.605.800	8,80%
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1,15	0	Program Pengembangan Perdagangan	522.280.000	339.921.866	339.921.866	-65,08%
					Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	400.000.000	310.826.866	89.173.134	22,29%
					Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	122.280.000	29.095.000	93.185.000	76,21%
	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.668.488.999,16	1.393.000.000,30	Program Pengembangan Perdagangan	53.050.000	36.195.500	8.095.263	15,26%
					Kegiatan Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	12.280.000	11.795.050	(1.698.161)	-13,83%
					Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	33.570.000	19.545.000	14.025.000	41,78%
					Kegiatan Partisipasi Pepper Day	7.200.000	4.855.450	6.271.823	87,11%
	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok waktu (koefisien variasi)	<11	8,23	Program Pengembangan Perdagangan	458.332.000	383.149.631	75.182.369	16,40%
					Kegiatan Pelaksanaan pasar Murah	222.865.000	181.285.000	123.297.167	55,32%
					Kegiatan Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	202.802.000	176.744.631	26.057.369	12,85%
					Kegiatan informasi Perdagangan Dalam Negeri	32.665.000	25.120.000	7.545.000	23,10%
	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	35%	35%	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian	71.360.000	36.522.000	34.838.000	48,82%
					Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	28.700.000	22.899.000	5.801.000	20,21%
					Kegiatan Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar	30.960.000	4.625.000	26.335.000	85,06%

					dan Jasa serta Tertib Niaga				
					Kegiatan Pengawasan Tertib Niaga	11.700.000	8.998.000	(8.998.000)	-76,91%
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2	2	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian Kegiatan:	163.795.000	156.018.400	7.776.600	4,75%
					Kegiatan Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	74.590.000	69.496.800	5.093.200	6,83%
					Kegiatan Pos Layanan Pengaduan Konsumen	42.180.000	41.579.400	600.600	1,42%
					Kegiatan Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	47.025.000	44.942.200	2.082.800	4,43%
	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	146	133,56	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	1.687.769.000	1.123.124.826,17	420.837.007	24,93%
					Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	1.344.569.000	854.642.776,17	489.926.224	36,44%
					Kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	32.050.000	16.726.400	4.640.267	14,48%
					Kegiatan Monitoring Mutu Pengujian	89.350.000	73.623.150	15.726.850	17,60%
					Kegiatan Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	32.000.000	28.400.000	3.600.000	11,25%
					Kegiatan Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	189.800.000	149.732.500	40.067.500	21,11%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Drs. H. Sunardi</b>				
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri (%)	5	9,25	$(\text{Jumlah Pelaku Usaha tahun } N \div \text{Jumlah Pelaku Usahatahun } N-1) * 100$
2.	Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri	Tingkat kenaikan harga kebutuhan barang pokok (%)	<2,5	2,38	$(\text{HargaKebutuhan Pokok tahun } N \div \text{Harga Kebutuhan Pokok tahun } N-1) * 100$
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	27.624.518,27	1.93,0	$(\text{Total NilaiEksportahun } N - \text{Total NilaiEksportahun } N-1)$
4.	Meningkatnya Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	8,31	$(\text{koefisien variatahun } N) < 11$
5.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1.15	0	$(\text{Jumlah Sarana tahun } N \div \text{Jumlah Sarana tahun } N-1) * 100$
6.	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pengujian	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari LABORATORIUM Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu	61.99	51,23	$(\text{Jumlah Sampel tahun } N \div \text{Jumlah Sampel tahun } N-1) * 100$
7.	Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen	Persentase Penurunan Jumlah Pengaduan %	5	5	$(\text{Jumlah Pengaduan tahun } N \div \text{Jumlah Pengaduan tahun } N-1) * 100$
8.	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	Persentase Tingkat Pelayanan (%)	100	100	$(\text{Tingkat Pelayanan tahun } N \div \text{Tingkat Pelayanan tahun } N-1) * 100$

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Drs. H. Sunardi</b>				
1.	Menumbuhkembangkan Industri Berbasis Potensi Daerah	Nilai Investasi Industri (Rp)	9.157.209.890	49.608.063	(Nilai Investasi Industri tahun N)
		Persentase Tenaga Kerja Industri	0.82	5,58	(Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan	1.15	0	(Jumlah Sarana Perdagangan tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) *100
3.	Meningkatnya Nilai ekspor	Nilai Ekspor (Juta US\$)	1.668.488.999,16	1.393,30	(Nilai Ekspor tahun N)
4.	Meningkatnya Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	Terkendalnya harga kebutuhan pokok antar waktu (koefisien variasi)	<11	8,23	(Koefisien Variasi tahun N) < 11
5.	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki legalitas	35%	35%	(Jumlah Pelaku Usaha tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Pelaku Usaha tahun N-1) *100
6.	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2	2	Indeks pada Tahun N
7.	Meningkatnya Pengujian dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Persentase Peningkatan Contoh Sampel dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	146	133,56	(Jumlah Sampel tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Sampel tahun N-1) *100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Deki Susanto</b>				
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100
		Predikat (NILAI) Sakip Perangkat Daerah	3	3	Nilai SAKIP

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Deki Susanto</b>				
1.	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%	100%	(Tingkat Pelayanan tahun N ÷ Tingkat Pelayanan tahun N-1)*100
		Predikat (NILAI) Sakip Perangkat Daerah	3	3	Nilai SAKIP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Aula Dedy Sayogo</b>				
1.	Meningkatkan Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai dengan Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Renja Perubahan
2.	Tersedianya Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja	5	5	LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, IKM, CALK
3.	Tersedianya Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi	12	12	Laporan Realisasi APBD dan APBN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Aula Dedy Sayogo</b>				
1.	Meningkatkan Tersedianya Dokumen Perencanaan sesuai dengan Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2	1 Dokumen Renja dan 1 Dokumen Renja Perubahan
2.	Tersedianya Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja	5	5	LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, IKM, CALK
3.	Tersedianya Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi	12	12	Laporan Realisasi APBD dan APBN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Paizal Ruskamsyah</b>				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang terlayani	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	132 Orang	132 Orang	Aparatur dan Pegawai Tidak Tetap yang dilayani Disperindag dan UPT BPSMB
2.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	39 Orang	39 Orang	Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktifitas Kantor dalam 12 Bulan	100 %	100%	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Paizal Ruskamsyah</b>				
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor yang terlayani	Jumlah Aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	132 Orang	132 Orang	Aparatur dan Pegawai Tidak Tetap yang dilayani Disperindag dan UPT BPSMB
2.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	39 Orang	39 Orang	Aparatur yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktifitas Kantor dalam 12 Bulan	100 %	100%	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Rita Wisna</b>				
1.	Terlaksananya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen SPM	50	69	SPM yang di Terbitkan
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan CALK	2	2	CALK Semester I dan CALK Semester II
3.	Terlaksananya Pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Bukti Pengeluaran SPJ	2300	3532	SPJ Kegiatan
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan	24	24	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan Setiap Bulan

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Rita Wisna</b>				
1.	Terlaksananya Pelayanan Perbendaharaan	Jumlah Dokumen SPM	50	69	SPM yang di Terbitkan
2.	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Laporan CALK	2	2	CALK Semester I dan CALK Semester II
3.	Terlaksananya Pengadministrasian dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Bukti Pengeluaran SPJ	2300	3532	SPJ Kegiatan
4.	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan	24	24	Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Penerimaan Setiap Bulan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Mashun</b>				
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Terbangun	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)	63 %	0%	(Jumlah Sarana Perdagangan tahun N – tahun N-1 : Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1)*100
2	Meningkatnya Jumlah Volume Ekspor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	862.000	619.141,19	(Volume Ekspor tahun (N)
3	Menstabilkan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	11 : 100	8,02 : 100	Koefisien Variasi tahun N) < 11
4	Meningkatkan Jumlah Rumah Tangga miskin yang terfasilitasi disektor perdagangan	Persentase Rumah Tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan	10 %	0	

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Armaini</b>				
1	Meningkatnya Sarana Perdagangan yang dibangun	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang dibangun (%)	1.15 %	0%	(Jumlah Sarana Perdagangan tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Sarana Perdagangan tahun N-1) *100
2	Meningkatnya Jumlah Volume Ekspor	Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	391.321,67	619.141,19	(Volume Ekspor tahun N)
3	Menstabilkan Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Tersedia Setiap Waktu	11 : 100	11	(Koefisien Variasi tahun N) < 11

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Tri Susanyati</b>				
1	Meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga barang pokok	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	45	45	Pelaksanaan Pasar Murah tahun N
2	Meningkatnya Jumlah Gudang yang Terbangun, dan Sistem Resi Gudang yang Dijalankan	Jumlah Gudang yang Terbangun dan Sistem Resi Gudang yang Dijalankan	1	2	Sistem Resi Gudang yang dijalankan tahun N
3	Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha dan Distributor disektor Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha, Distributor	40	40	Pelaku Usaha tahun N
4	Meningkatkan informasi data harga barang pokok dan barang penting lainnya	Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya (komoditi)	20	20	Informasi harga barang pokok dan penting tahun N
5	Meningkatkan kemampuan pelayanan pengelola gudang	Jumlah Orang	10	10	Pengelola Gudang yang terlatih tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Mardian A.Zulkarnain</b>				
1	Meningkatnya Jumlah Gudang yang Terbangun, dan Sistem Resi Gudang yang Dijalankan	Jumlah Gudang yang Terbangun dan Sistem Resi Gudang yang Dijalankan	1	2	Sistem Resi Gudang yang dijalankan tahun N
2	Meningkatkan kemampuan pelayanan pengelola gudang	Jumlah Orang	10	10	Pengelola Gudang yang terlatih tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Rosy Handayani</b>				
1	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Mineral terhadap Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terverifikasi dan Terawasi	45	39	Pelaku Usaha yang terverifikasi tahun N
2	Meningkatnya Promosi dan Akses Pasar Produk Lada	Jumlah Pelaku Usaha Lada yang Terakses Mempromosikan Produk Lada	11	17	Pelaku Usaha yang terakses mempromosikan produk lada tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Rosy Handayani</b>				
1	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Mineral terhadap Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terverifikasi dan Terawasi	45	39	Pelaku Usaha yang terverifikasi tahun N
2	Meningkatnya Promosi dan Akses Pasar Produk Lada	Jumlah Pelaku Usaha Lada yang Terakses Mempromosikan Produk Lada	11	17	Pelaku Usaha yang terakses mempromosikan produk lada tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Wisniarti</b>				
1	Meningkatkan promosi produk unggulan daerah ditingkat nasional	Jumlah Akses Pasar	4	3	Akses Pasar tahun N
2	Meningkatkan fasilitas yang memadai untuk menunjang usaha kecil menengah	Jumlah Gerobak	20	0	Gerobak yang diserahkan kepada pedagang tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Wisniarti</b>				
1	Meningkatkan promosi produk unggulan daerah ditingkat nasional	Jumlah Akses Pasar	3	3	Akses Pasar tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Tanaim</b>				
1.	Meningkatkan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Kawasan Industri dan SIKIM	1	0	SIKIM pada Tahun N
2.	Meningkatkan Industri yang memenuhi standar Industri	Jumlah Industri yang memenuhi standar industri	15	5	Industri yang memenuhi Standar pada Tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Wira Purnama</b>				
1.	Meningkatkan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Persentase Kawasan Industri dan SIKIM	0 : 14	14	SIKIM tahun N $\div 7 * 100$

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Subekti Saputra</b>				
1.	Meningkatkan kapasitas pelaku industri yang Memahami Kawasan Industri / SIKIM	Jumlah Dokumen	1	1	1 Dokumen SIKIM
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan pembentukan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Jumlah Lokasi	2	1	Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan Sentra di Belitung Timur dan Bangka Tengah
3.	Meningkatnya Pelaku Industri / Masyarakat yang Diberdayakan Melalui Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri / Masyarakat	500	500	Peserta Pelatihan, Pameran dan Sosialisasi

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Muhammad Rizal</b>				
1.	Meningkatkan Pembinaan dan Penyuluhan pembentukan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Jumlah Lokasi	2	1	Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan Sentra di Belitung Timur dan Bangka Tengah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>A. Wahab</b>				
1.	Meningkatkan industri yang memenuhi standar kelayakan industri	Jumlah Industri yang diawasi	50	50	Industri yang diawasi tahun N
2.	Meningkatkan Jumlah Pelaku Industri yang Memahami Standar Produk Industri	Jumlah Pelaku Usaha Industri yang Memahami Standar Produk Industri	60	60	Pelaku Usaha Industri yang memahami standar Produk Industri tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Tri Susanyati</b>				
1.	Meningkatkan industri yang memenuhi standar kelayakan industri	Jumlah Industri yang diawasi	50	50	Industri yang diawasi tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Ari Masdan</b>				
1.	Meningkatkan legalitas industri aktif	Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi	1	3	n=n-1
2.	Meningkatkan izin usaha industri Perusahaan	Jumlah Buku yang tersusun	1	1	n=n-1 bab/bagian dari buku yang tersusun

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Ari Masdan</b>				
1.	Meningkatkan legalitas industri aktif	Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi	1	6	n=n-1
2.	Meningkatkan izin usaha industri Perusahaan	Jumlah Buku yang tersusun	1	1	n=n-1 bab/bagian dari buku yang tersusun

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Syaparuddin</b>				
1	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri Terhadap Total Tenaga Kerja	5,17%	5,79%	(Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N ÷ Jumlah Total Tenaga Kerja tahun N)*100
2	Meningkatnya Jumlah Industri pada Sektor Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan Industri pada Sektor Kelautan dan Perikanan	2,5%	4,9%	(Jumlah Industri KP tahun N ÷ Jumlah Industri KP tahun N-1)*100
3	Tumbuhnya Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kelautan dan Perikanan	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	0,70%	2,9%	(Jumlah TK Industri KP tahun N ÷ Jumlah TK Industri KP tahun N-1)*100
4	Tumbuhnya Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pariwisata	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Pariwisata	0,32%	30%	(Jumlah TK Industri Pariwisata tahun N ÷ Jumlah TK Industri Pariwisata tahun N-1)*100
5	Meningkatnya Jumlah Industri yang Memiliki Informasi Kandungan Nutrisi Olahan Pangan	Persentase Industri yang Memiliki Informasi Kandungan Nutrisi Olahan Pangan	4%	97%	(Jumlah Industri OP tahun N ÷ Jumlah Industri OP tahun N-1)*100
6	Tumbuhnya Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian	Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian	10,28%	102,8%	(Jumlah TK Industri Pertanian tahun N ÷ Jumlah TK Industri Pertanian tahun N-1)*100

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Subekti Saputra</b>				
1	Meningkatnya Produk Industri yang Berdaya Saing	Persentase Produk Industri yang Berdaya Saing	20 %	20%	(Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Produk Industri Berdaya Saing tahun N-1)*100
2	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri	20%	20%	(Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Tenaga Kerja Industri tahun N-1)*100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Dian Novita</b>				
1	Meningkatkan Pelaku Industri yang bergerak disektor kelautan, perikanan dan pariwisata	Pelaku Industri (kelompok)	3	0	Jumlah Kelompok
2	Bertambahnya Produk Kreatif yang Disertakan Dalam Lomba di Level Nasional	Pelaku Industri Dalam Lomba Produk Kreatif (produk)	30	30	Produk Kreatif yang ikut lomba
3	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Inovasi dan diversifikasi Produk bagi Pelaku Industri	SDM yang terlatih	80	80	SDM yang terlatih

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Dian Novita</b>				
1	Bertambahnya Produk Kreatif yang Disertakan Dalam Lomba di Level Nasional	Pelaku Industri Dalam Lomba Produk Kreatif (produk)	30	30	Produk Kreatif yang ikut lomba

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Marhoto</b>				
1	Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan diversifikasi Produksi	Jumlah Teknologi Tepat Guna	3	0	Teknologi Tepat Guna tahun N
2	Meningkatkan Produk Industri yang Bersertifikasi OVOP	Jumlah Produk OVOP	9	9	Produk OVOP tahun N
3	Meningkatkan Pelaku Industri olahan pangan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	700	700	Pelaku Industri yang terfasilitasi tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Marhoto</b>				
1	Meningkatkan Produk Industri yang Bersertifikasi OVOP	Jumlah Produk OVOP	9	9	Produk OVOP tahun N
2	Meningkatkan Pelaku Industri olahan pangan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	700	700	Pelaku Industri yang terfasilitasi tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Yoharman</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Kemasan Produk bagi Pelaku Industri	Jumlah Pelaku Industri yang Terfasilitasi	400	400	Pelaku Industri yang terfasilitasi tahun N
2	Meningkatkan Jaringan Pemasaran bagi Pelaku Industri yang terfasilitasi Promosi, Market Place dan Gelar Produk Industri	Jumlah Pemasaran Industri Kecil dan Menengah (event)	9	15	Pemasaran Produk IKM pada tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Yoharman</b>				
1	Meningkatkan Kualitas Kemasan Produk bagi Pelaku Industri	Jumlah Pelaku Industri yang Terfasilitasi	400	400	Pelaku Industri yang terfasilitasi tahun N
2	Meningkatkan Jaringan Pemasaran bagi Pelaku Industri yang terfasilitasi Promosi, Market Place dan Gelar Produk Industri	Jumlah Pemasaran Industri Kecil dan Menengah (event)	9	15	Pemasaran Produk IKM pada tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Riza Aryani</b>				
1	Meningkatnya Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	14	14%	(Barang dan Jasa diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa ) *100
2	Meningkatnya Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga (140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga (140 pelaku usaha Tertib Niaga)	11	16%	(Pelaku Usaha yang diawasi tahun N ÷ Total Pelaku Usaha ) *100
3	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)	21-40	43,34	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan
4	Meningkatnya Persentase Pengembangan Standarisasi dan Lab. K metrologian	Persentase Pengembangan Standarisasi dan Lab. K metrologian	14	0	(Lab Metrologi yang memenuhi standar kelayakan tahun N ÷ Total Lab pada Kab kota) *100

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Riza Aryani</b>				
1	Meningkatnya Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	Persentase Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan (112 barang SNI wajib)	14	14%	(Barang dan Jasa diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa ) *100
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Pelaku Usaha yang diawasi (140 pelaku usaha perdagangan)	20	26	Pelaku Usaha yang diawasi tahun N
2	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (0-20 = Sadar; 21-40 = Paham; 41-60 = Mampu; 61-80 = Kritis; 81-100 = Berdaya)	37	43,34	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Luciana</b>				
1	Meningkatkan Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa Terhadap Ketentuan Berlaku	Jumlah Barang dan Jasa yang di Awasi	14	14	(Barang dan Jasa diawasi tahun N ÷ Total Barang dan Jasa )*100
2	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Perizinan Perdagangan	15	15	(Pelaku Usaha yang diawasi tahun N ÷ Total Pelaku Usaha )*100

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Luciana</b>				
1	Meningkatkan Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa Terhadap Ketentuan Berlaku	Jumlah Barang dan Jasa yang di Awasi	14	14	Barang dan Jasa diawasi tahun N
2	Meningkatkan Penegakan Hukum Pelanggaran dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa	Pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)	1	0	Kasus yang ditindaklanjuti tahun N
3	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Perizinan Perdagangan	14	14	Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Zurista</b>				
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (21-40 = Paham)	35	43,34	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Zurista</b>				
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen (21-40 = Paham)	37	37	Nilai Indeks yang ditetapkan Oleh kementerian Perdagangan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Mardian A. Zulkarnain</b>				
1	Meningkatkan Pengembangan Standarisasi dan Laboratorium Kemetrolgian Kab/Kota	Pengembangan Standarisasi dan Laboratorium Kemetrolgian	1	0	Lab Metrologi yang memenuhi standar kelayakan pada tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Moch. Nasirin Yusuf EF</b>				
1.	Meningkatnya Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	Persentase Komoditi Unggulan Daerah yang diuji dan memenuhi Standar Pengujian	18%	51,23%	Jumlah Komoditi dan besaran tahun N ÷ Total Komoditi dan besaran )*100
		Nilai Retribusi	271.000.000	138.835.000	Nilai Retribusi tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Moch. Nasirin Yusuf EF</b>				
1.	Meningkatnya Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	Persentase Peningkatan Komoditi Unggulan Daerah yang diuji	33,33%	18%	Jumlah Komoditi yang diuji tahun N – tahun N-1 ÷ Jumlah Komoditi tahun N-1 )*100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Arifin Noor</b>				
1.	Meningkatkan Pelayanan Aparatur	Jumlah Orang (Aparatur)	17	18	Jumlah Aparatur UPTD Tahun N
2.	Meningkatkan Pelayanan Perdagangan melalui Standarisasi dan Pengujian Mutu	Peningkatan Kualitas Parameter Pengujian Lada Putih dan CPO	9 : 5	9 : 5	Kualitas parameter Pengujian tahun N
		Sertifikat yang diterbitkan dari Hasil Uji/Sertifikat Mutu Lada Putih dan CPO	185 : 17	32 : 1	Sertifikat yang diterbitkan tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Herdian</b>				
1.	Meningkatkan Pelayanan Perdagangan melalui Standarisasi dan Pengujian Mutu	Peningkatan Kualitas Parameter Pengujian Lada Putih dan CPO	9 : 5	9 : 5	Kualitas parameter Pengujian tahun N
		Sertifikat yang diterbitkan dari Hasil Uji/Sertifikat Mutu Lada Putih dan CPO	185 : 17	184 : 11	Sertifikat yang diterbitkan tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Novi Puspita</b>				
1.	Mempertahankan Akreditasi dan Ruang Lingkup Pengujian	Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	2	2	Status Akreditasi Laboratorium tahun N
2.	Meningkatkan Mutu Produk yang diuji	Jumlah Produk yang diuji	1	1	Produk yang diuji tahun N
3.	Meningkatkan Pemahaman Petani Lada terhadap Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta	50	200	Peserta tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Novi Puspita</b>				
1.	Mempertahankan Akreditasi dan Ruang Lingkup Pengujian	Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium	2	2	Status Akreditasi Laboratorium tahun N
2.	Meningkatkan Mutu Produk yang diuji	Jumlah Produk yang diuji	1	1	Produk yang diuji tahun N
3.	Meningkatkan Pemahaman Petani Lada terhadap Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta	50	200	Peserta tahun N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Siti Suhaidah</b>				
1.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi	10 Orang	6 Orang	Jumlah Aparatur UPTD yang berkompeten Tahun N
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD BPSMB	Jumlah Aparatur UPTD yang terlayani selama 12 Bulan	23 Orang	23 Orang	Jumlah Aparatur UPTD tahun N
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktivitas Kantor Dalam 1 (satu) Tahun	100 %	100%	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia tahun N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Definisi Operasional
	<b>Siti Suhaida</b>				
1.	Meningkatkan Kompetensi dan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi	10 Orang	6 Orang	Jumlah Aparatur UPTD yang berkompeten Tahun N
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional UPTD BPSMB	Jumlah Aparatur UPTD yang terlayani selama 12 Bulan	23 Orang	23 Orang	Jumlah Aparatur UPTD tahun N
3.	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Operasional Kantor	Lancarnya Aktivitas Kantor Dalam 1 (satu) Tahun	100 %	100%	Sarana dan Prasarana Kantor Tersedia tahun N